



Desak Evaluasi Sistem e-Katalog

PONTIANAK - Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-Katalog versi 6, yang diterapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menuai kritik keras.

Di Kalbar, sistem ini dinilai memperlambat pencairan dana APBD hingga menyebabkan uang daerah tersendat dan tidak langsung mengalir ke masyarakat. Putaran uangnya berputar ke pihak ketiga yakni PT. Finnet yang ditunjuk oleh Telkom, sebagai pemroses pembayaran.

Hal itu dikatakan Sueb, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalbar. Ia mengkritisi pelaksanaan sistem e-Katalog versi 6 yang dinilai lebih rumit dan berbelit-belit dibanding versi sebelumnya.

Ia menyebut ada dua lembaga keuangan yang terlibat dalam proses penyaluran dana APBD Kalbar. Pertama Bank Kalbar sebagai bank daerah dan pihak Ketiga yang ditunjuk LKPP, yakni Telkom menunjuk lagi ke PT Finnet Indonesia.

"Ini seperti main bola saja. Tapi bolanya diputar-putar sendiri. Uang daerah harusnya bisa cepat bergerak,

menghidupi kontraktor, pekerja, dan rakyat. Tapi sekarang malah dibawa berputar-putar. Kalau aksesnya cepat ya sukur, tetapi malah lama dan jadi panjang birokrasinya. Itu dialami para pelaksana. Mereka sudah mengadu kepada kami (DPRD Kalbar)," ucap Sueb, Rabu (4/6).



◆ Ke Halaman 11 kolom 1

Kalau sistem ini tidak dievaluasi, ke depan berpotensi akan banyak proyek mangkrak, dana tak terserap, dan rakyat yang rugi. Kami akan sampaikan hal ini secara resmi nantinya di saat rapat paripurna

Sueb

Sambungan dari halaman 9

Yang lebih mencemaskan lagi, Sueb mempertanyakan siapa yang menjadi penjamin jika terjadi kendala atau bahkan gagal transfer dana. Dalam sistem ini, LKPP menunjuk Telkom, lalu Telkom menunjuk anak perusahaannya, PT Finnet, sebagai operator teknis pembayaran.

"Bank saja punya LPS sebagai penjamin. Lalu kalau ini? Apakah Telkom punya dana cukup sebagai penjamin transaksi bernilai besar jika terjadi kendala? Ini uang daerah, bukan uang main-

main," tegasnya lagi.

Politisi Hanura Kalbar ini juga menambahkan berdasarkan penelusurannya koordinasi antara biro jasa pemerintah provinsi dengan pihak Finnet sangat sulit dilakukan. Itu karena tidak ada perwakilan resmi Finnet di Pontianak. Proses pencairan dana yang biasanya hanya butuh waktu satu hari kini bisa tertunda hingga beberapa hari tanpa kejelasan. Itu sudah dialami banyak pelaksanaan jasa konstruksi barang dan jasa.

"Pelaksanaan program kerja, baik itu kontraktor maupun penyedia jasa, sudah mulai

protes. Mereka bilang sudah 5 hari dana tak cair. Padahal biasanya besoknya sudah masuk rekening ketika sudah ditransferkan bank daerah," tambah Sueb.

Sueb mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi sistem e-Katalog versi 6. Menurutnya, regulasi semacam ini justru membebani daerah dan menghambat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

"Kalau sistem ini tidak dievaluasi, ke depan berpotensi akan banyak proyek mangkrak, dana tak terserap, dan rakyat yang rugi. Kami akan sampaikan hal ini secara

resmi nantinya di saat rapat paripurna," jelasnya.

Sueb melanjutkan bahwa sistem digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya mempermudah proses dan meningkatkan transparansi. Namun, jika implementasinya justru memperpanjang rantai birokrasi dan mempersulit daerah, maka tujuan awal akan lenyap begitu saja.

"Transparansi, pertanggungjawaban, dan kepastian penjaminan harus segera diperjelas agar uang rakyat tidak hilang dalam labirin teknologi," pungkask dia. **(den)**